



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	410.800.000,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	0,00	410.800.000,00
11	Retribusi Jasa Usaha		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Pervertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Pervertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		682.000.000,00	643.900.000,00	94,41	-
17	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
19	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
20	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
21	Jasa Giro		-	-	-	-
22	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
23	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
25	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		682.000.000,00	643.900.000,00	94,41	-
26	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
30	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
31	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
32	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
33	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
34	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
35	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
36	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
37	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
38	Pendapatan Zakat		-	-	-	-
39	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa		-	-	-	-
40	Pendapatan Lain-Lain SKPKD		-	-	-	-
41	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		692.000.000,00	653.900.000,00	94,49	410.800.000,00
42						
43	PENDAPATAN TRANSFER					
44	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
45	Dana Perimbangan		-	-	-	-
46	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
47	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
48	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
49	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
50	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
51						
52	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
53	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Neoeeri		-	-	-	-
57	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Neoeeri/Luar Neoeeri		-	-	-	-
58	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
59	Dana Darurat		-	-	-	-
60	Dana Darurat		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
62	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		692.000.000,00	653.900.000,00	94,49	410.800.000,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		69.925.469.000,00	68.570.484.310,00	98,06	23.323.784.511,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		59.580.017.000,00	58.370.109.953,00	97,97	10.180.649.013,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		10.345.452.000,00	10.200.374.357,00	98,60	10.824.764.498,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	-	2.318.371.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
76	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
77	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-
78	Belanja Barang dan Jasa		15.687.738.000,00	14.843.362.722,00	94,62	18.613.570.137,00
79	Belanja Barang		2.853.323.000,00	2.734.579.488,00	95,84	4.628.096.538,00
80	Belanja Jasa		8.019.056.000,00	7.435.785.293,00	92,73	7.776.672.434,00
81	Belanja Pemeliharaan		1.107.718.000,00	1.026.188.779,00	92,64	1.871.122.405,00
82	Belanja Perjalanan Dinas		3.707.641.000,00	3.646.809.162,00	98,36	4.337.678.760,00
83	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	-	-
84	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
85	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
86	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
87	Belanja Bunga		-	-	-	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
92	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)					
93	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD					
94	Belanja Subsidi					
95	Belanja Subsidi kepada BUMN					
96	Belanja Subsidi kepada BUMD					
97	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta					
98	Belanja Hibah					
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat					
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					
101	Belanja Hibah kepada BUMN					
102	Belanja Hibah kepada BUMD					
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					
104	Belanja Hibah Dana BOS					
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					
106	Belanja Bantuan Sosial					
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bidang Lainnya)					
111	Jumlah Belanja Operasi		85.613.207.000,00	83.413.847.032,00	97,43	41.937.354.648,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah					
115	Belanja Modal Tanah					
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		728.000.000,00	706.998.700,00	97,12	1.119.590.180,00
117	Belanja Modal Alat Besar					
119	Belanja Modal Alat Angkutan					4.850.000,00
120	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					
121	Belanja Modal Alat Pertanian					
122	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		76.253.000,00	69.655.300,00	91,35	263.264.900,00
123	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		15.090.000,00	13.879.000,00	91,97	44.516.000,00
124	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					
125	Belanja Modal Alat Laboratorium					
126	Belanja Modal Alat Persenjataan					
127	Belanja Modal Komputer		636.657.000,00	623.464.400,00	97,93	806.959.280,00
128	Belanja Modal Alat Eksplorasi					
129	Belanja Modal Alat Pengeboran					
130	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					
131	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi					
132	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					
133	Belanja Modal Alat Peraga					
134	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi					
135	Belanja Modal Rambu-rambu					
136	Belanja Modal Peralatan Olahraga					
137	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS					
138	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					96.305.000,00
139	Belanja Modal Gedung					96.305.000,00
140	Belanja Modal Monumen					
141	Belanja Modal Bangunan Menara					
142	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					
143	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
144	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					
145	Belanja Modal Bangunan Air					
146	Belanja Modal Instalasi					
147	Belanja Modal Jaringan					
148	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
149	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					
150	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga					
151	Belanja Modal Hewan					
152	Belanja Modal Biota Perairan					
153	Belanja Modal Tanaman					
154	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya					
155	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS					
157	Belanja Modal Aset Lainnya					
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud					
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain					
160	Jumlah Belanja Modal		728.000.000,00	706.998.700,00	97,12	1.215.895.180,00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga					
164	Belanja Tidak Terduga					
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga					
166						
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil					
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					
170	Belanja Bantuan Keuangan					
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi					
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					
176	Jumlah Belanja Transfer					
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		86.341.207.000,00	84.120.845.732,00	97,43	43.153.249.828,00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(85.649.207.000,00)	(83.466.945.732,00)	97,45	(42.742.449.828,00)
181						
182	PEMI PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PEI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
185	Pelampauan Penerimaan PAD					
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer					
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan					
189	Penchamatan Belanja					
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan					
191	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pencelurahan Pembiayaan					
192	Sisa Belanja Lainnya					
193	Pencairan Dana Cadangan					
194	Pencairan Dana Cadangan					
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Perundang		-	-	-	-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Perundang		-	-	-	-
237	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(85.649.207.000,00)	(83.466.945.732,00)	-	(42.742.449.828,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

